

SELEKSI CASN

Ombudsman RI Terima 375 Pengaduan

JAKARTA (KR) - Ombudsman Republik Indonesia menerima 375 laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021.

"Temuan dalam setahun ini, 2021-2022, ada 375 laporan masyarakat yang kami terima. Ada 204 yang ditangani di pusat, yaitu instansi terlapornya adalah kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah (pemda) yang membutuhkan penyelesaian di tingkat pusat. Sisanya, merupakan laporan yang ada di tingkat daerah dan dapat dikerjakan oleh 34 kantor perwakilan kami," ungkap Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam acara update publik 'Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/6).

Dari seluruh laporan itu, lanjut Robert Na Endi Jaweng, Ombudsman berhasil menuntaskan 92 persen atau 345 laporan berkat

sinergisme dengan berbagai pihak, sedangkan 8 persen sisanya sedang dalam proses penyelesaian karena memuat substansi krusial, seperti maladministrasi yang memerlukan penangan hukum pidana.

Awalnya, katanya, Ombudsman RI menerima ribuan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai Seleksi Penerimaan CASN 2021. Namun, dari seluruh pengaduan tersebut, Ombudsman mengategorikan ke dalam dua jenis laporan, yaitu konsultasi laporan dan konsultasi nonlaporan. "Ada 375 laporan masyarakat yang kami terima di luar konsultasi nonlaporan; yang ribuan tadi, konsultasi nonlaporan," tambahnya.

Dijelaskan, konsultasi nonlaporan merupakan jenis laporan atau pengadu-

an dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan dapat diselesaikan melalui komunikasi via telepon, sedangkan konsultasi laporan adalah laporan yang memenuhi syarat dan memerlukan penanganan secara langsung oleh Ombudsman.

Dari data pendistribusian laporan yang dicatat Ombudsman, Robert menyebutkan Sulawesi Tenggara menjadi daerah dengan laporan terbanyak dari masyarakatnya, yakni 21 laporan. "Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang paling banyak laporan, kemudian diikuti dengan Jawa Timur (18 laporan), Bangka Belitung (14 laporan), dan seterusnya," jelasnya.

Sementara itu, provinsi dengan paling sedikit laporan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Jambi, dan Gorontalo. Kelima provinsi tersebut hanya menerima masing-masing satu laporan dari masyarakat. (Ant/San)-f

SiLPA APBD DIY Capai Rp 554 M

YOGYA (KR) - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2021 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 554,487 miliar. SiLPA tersebut bersumber dari realisasi serapan anggaran yang mencapai 91,46 persen.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dalam Rapat Paripurna Penghantaran Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 di DPRD DIY, Kamis (16/6). Wagub yang mewakili Gubernur DIY juga melaporkan realisasi surplus sebesar Rp 172,927 miliar.

Surplus diperoleh dari realisasi pendapatan dan belanja. Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp 5,675 triliun, direalisasikan sebesar Rp 5,703 triliun atau 100,50 persen. Belanja dianggarkan Rp 6,047 triliun dan direalisasikan Rp 5,530 triliun atau 91,46 persen.

Wakil Ketua DPRD DIY *ex-officio* Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DIY, Suharwanta ST, mengapresiasi Pemda DIY

yang dapat mengefisienkan pembelanjaan. "Dengan efisiensi itu memungkinkan kita mempunyai SiLPA yang bisa digunakan untuk keperluan mendesak di perubahan anggaran," katanya.

Suharwanta berharap serapan anggaran sebesar 91,46 persen ke depan dapat ditingkatkan, agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat DIY. Terkait SiLPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebesar Rp 554,487 miliar, DPRD DIY meminta SiLPA tersebut dirancah penggunaannya pada Raperda APBD Perubahan 2022 untuk program-program prioritas.

Wagub juga melaporkan Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 489,453 miliar dengan realisasi Rp 494,060 miliar atau 100,94 persen. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan Rp 117,500 miliar dengan realisasi Rp 112,500 miliar atau 95,74 persen. Pembiayaan Netto dianggarkan Rp 371,953 miliar dengan realisasi Rp 381,560 miliar atau 102,58 persen. (Bro/Awh)-f

'UMY & AMBASSADORS GATHERING' Kedutaan Harus Memonitor Mahasiswa di Yogya

JAKARTA (KR) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) meminta masing-masing negara melalui kedutaannya di Jakarta memonitor dan melihat perkembangan seberapa jauh mahasiswa yang menempuh pendidikan di Yogya. Apalagi tahun 2022 mahasiswa asing yang mendaftar di UMY mencapai 1.411.

Rektor UMY Prof Dr Gunawan Budi-yanto mengemukakan hal tersebut dalam 'UMY & Ambassadors Gathering' di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (16/6).

'UMY & Ambassadors Gathering' baru diselenggarakan pertama kali oleh UMY serta mengundang duta besar dan perwakilan dari 13 negara, yakni Syria, Pakistan, Ekuador, Afrika Selatan, Turki, Taiwan, Palestina, Moroko, Yaman, Irak, Thailand, Bangladesh dan Perancis.

"Kami optimis sambutan dari pihak kantor duta besar di Jakarta mengarah positif untuk melakukan kerja sama, sehingga tahun-tahun mendatang, UMY dapat melakukan ekspansi terhadap penyelenggaraan mahasiswa internasional yang meningkat drastis," tambahnya.

Ketua PP Muhammadiyah Prof Syaifiq A Mughni MA PhD menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan UMY tersebut. Hal ini merupakan agenda penting bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena hal tersebut termasuk dari amanah tujuan Muhammadiyah ke depannya, yaitu internasionalisasi Muhammadiyah.

Syaifiq juga menambahkan, UMY dapat menjadi contoh bagi kampus PTMA yang lain dalam menjalin kerja sama internasional. (Fsy)-d

AKADEMI KOMUNITAS SENI DAN BUDAYA Menjadi Bagian Keistimewaan DIY



Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta Sebagai Bagian Keistimewaan DIY'.

DAERAH Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah perguruan tinggi vokasi (program D1) di bidang seni budaya yang diberi nama Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya (AKNSB) Yogyakarta. Selain menjadi bagian dari keistimewaan DIY, AKNSB Yogyakarta ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi milik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Direktur AKNSB Yogyakarta Drs Supadma MHum menuturkan, AKNSB Yogyakarta awalnya bernama Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (belum ada tambahan negeri). AKNSB Yogyakarta merupakan perguruan tinggi vokasi yang mengelola program D1. Pendirian akademi ini diprakarsai oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di tahun 2013. Dalam proses belajar mengajarnya, AKNSB merekrut mahasiswa khusus yang berasal dari DIY dimulai tahun ajaran 2014/2015, sehingga sampai saat ini sudah 7 angkatan.

"AKNSB Yogyakarta ini merupakan pendidikan di luar domisili (PDD) dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, maka dari itu semua prodi yang ada di akademi merupakan bagian dari ISI Yogyakarta," terang Supadma dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta Sebagai Bagian Keistimewaan DIY'.

wan DIY'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepulauan Danurejan Yogyakarta, Kamis (16/6) dan disiarkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>. Kegiatan ini didanai dengan dana keistimewaan.

Rembag Kaistimewan juga menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs R Kadarmanta Baskara Aji, Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi, dan Alumni AKNSB Yogyakarta Rodi Martono dipandu Wiji Rachmadhani. Acara dimeriahkan *special performance* PCA Entertainment dan S25 Entertainment.

Menurut Supadma, AKNSB Yogyakarta memiliki tiga program studi yaitu D1 Seni Kriya Kulit, D1 Seni Tari dan D1 Seni Karawitan. AKNSB Yogyakarta memiliki visi sebagai pusat pengembangan seni yang unggul, andal dan bermartabat dengan berbasis budaya lokal dan berwawasan global. Adapun misinya antara lain, melaksanakan pendidikan seni dan budaya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam rangka melestarikan,

mengembangkan dan membina potensi seni budaya lokal agar dapat mengoptimalkan tenaga terampil yang berwawasan global.

Sedangkan Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, latar belakang dirikannya AKNSB Yogyakarta berangkat dari keprihatinan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang melihat seniman, pengrawit, budayawan sering kesulitan saat melakukan pentas di luar negeri, karena selalu ditanya sertifikat profesinya. Maka dipilihlah pendirian AKNSB Yogyakarta dengan ijazah D1. "Jadi pendirian AKNSB Yogyakarta ini berangkat dari *dawuh* Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," kata Baskara Aji.

Menurut Baskara Aji, mahasiswa AKNSB Yogyakarta angkatan awal adalah para seniman, budayawan dan pengrawit yang sudah *sepuh* (tua) tapi mahir memainkan gamelan, menari, talarung, karena memang profesinya. "Mereka sudah profesional kemudian kita lengkapi dengan sertifikat sesuai prodi, ternyata ini membuat nilai tambah bagi mereka, semula tanpa ijazah sekarang mempunyai ijazah," tuturnya.

Kemudian, lanjut Baskara Aji, dengan telah memiliki sertifikat/ijazah maka honorinya berbeda dibanding dengan yang tanpa ijazah. Namun untuk menjadi mahasiswa di AKNSB Yogyakarta harus punya kemahiran

lebih dahulu, karena mustahil membekali keterampilan dari nol dalam waktu hanya satu tahun. "Jadi mahasiswanya tidak sama sekali tanpa keterampilan, sebelum masuk mereka dites punya keterampilan di salah satu bidang tari, karawitan atau kriya kulit. Kalau dulu mahasiswanya *sepuh-sepuh*, saat ini mulai banyak yang *fresh graduate*," katanya.

Aris Eko Nugroho sepakat bahwa arahan pertama pendirian AKNSB Yogyakarta berasal dari Ngarsa Dalem yang melihat potensi seni budaya di DIY yang sangat luar biasa, tetapi ada ketidakadilan antara yang ahli dan tidak ahli, maka munculah keinginan membikin akademi ini. Kalau dikaitkan dengan Paniradya Kaistimewan DIY, pada awalnya memang banyak yang berkaitan dengan pemanfaatan fisik. Sedangkan di tahun 2022 ini lebih diarahkan pada pengelolaan agar akademi ini bisa berjalan.

"Proses itu menjadi bagian yang harus mencerminkan, bahwa yang namanya keistimewaan di DIY, ada yang bisa diciptakan, tetapi ada juga yang memang sudah ada tanpa diciptakan. Ini merupakan bagian dari upaya kita memberi warna terhadap keistimewaan di Yogyakarta, salah satunya dengan akademi (AKNSB) Yogyakarta," katanya. (Dev)

BAGI GURU MADRASAH BUKAN PNS

Tunjangan Insentif Cair Akhir Juni

JAKARTA (KR) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan proses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera cair secara bertahap mulai bulan Juni 2022 ini, sebagai bentuk kehadiran Pemerintah bagi tenaga pendidik.

"Hasil cek terakhir saya ke jajaran Ditjen Pendidikan Islam, mereka sudah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana. Saya minta akhir Juni 2022, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru madrasah bukan PNS penerima insentif," kata Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/6).

Yaqut mengatakan, insentif ini diberikan kepada guru non-PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Adapun besarnya yakni Rp 250.000 perbulan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Menag, saat ini sedang diproses pencairan untuk enam bulan bagi 216.000 guru madrasah non-

PNS. Insentif ini merupakan bentuk rekognisi negara untuk para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa. "Saya berharap tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level," katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak. "Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," ujarnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menjelaskan, insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi, karena keterbatasan anggaran.

Adapun kriterianya seperti aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di Program Simpatika atau Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama, belum lulus sertifikasi, memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama.

Kemudian, berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru bukan PNS yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat dua tahun. (Ant/San)-f

BPKH PERINGATI MILAD KE-5

Fokus Sustainability Keuangan Haji

JAKARTA (KR) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan peringatan Milad ke-5 sejak dibentuk tahun 2017 silam. Acara yang digelar di kawasan Bidakara Pancoran Jakarta Selatan ini mengusung tema 'Dedikasi untuk Umat'. Di tengah wabah pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, insan BPKH tetap menjaga komitmen yang tinggi agar BPKH dapat terus bertumbuh dan berdedikasi untuk umat.

Dalam kurun waktu lima tahun sejumlah terobosan penting telah dilakukan antara lain melalui pengelolaan Dana Abadi Umat melalui tata kelola yang baik dimana imbal hasilnya disalurkan kepada umat melalui program kemasyarakatan. Pada tahun 2019, BPKH mencanangkan sebagai tahun investasi langsung. BPKH juga untuk pertama kalinya membagikan nilai manfaat imbal hasil investasi kepada jemaah tunggu melalui Virtual Account (va.bpkh.go.id) pada tahun yang sama.

Sebagaimana yang disampaikan Divisi Komunikasi dan Humas BPKH Nurul Qoyimah, Kamis (16/6), memasuki tahun ketiga lembaga hukum independen publik ini menekankan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan haji sebagai salah satu upaya dalam peningkatan percepatan pelayanan keuangan haji yang transparan dan akuntabel, antara lain melalui Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) yang menyediakan database terintegrasi yang didukung penggunaan data center canggih.

Saat ini Siskehat Generasi kedua (Siskehat Gen 2) bahkan telah diujicobakan pada sejumlah Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dengan fitur yang terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan. Tak hanya itu BPKH juga melakukan pengembangan Aplikasi Ikhshan yang menyediakan data real time terkait pengelolaan keuangan haji.

Anggota Badan Pelaksana BPKH

Ajar Susanto Broto dalam pidato refleksi milad, mengatakan, nilai manfaat/imbal hasil dari investasi yang dilakukan BPKH guna penyelenggaraan ibadah haji juga terus meningkat dengan imbal hasil tahun 2021 mencapai 10,5 Triliun dengan total dana kelolaan mencapai Rp 158,8 triliun.

Selain melakukan pengembangan Investasi Luar Negeri melalui *Awqaf Property Investment Fund* (APIF) bersama Islamic Development Bank (IsDB), jelasnya, aksi korporasi lain yang telah berhasil dilakukan BPKH adalah kembali membawa Bank Muamalat Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi.

Tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir masa tugas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas periode 2017-2022, penyelenggaraan ibadah haji kembali dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian, diantaranya pengurangan jumlah kuota haji hingga menjadi sekitar setengah dari kuota tahun 2019. (Obi)-f



KR-Sukro Riyadi

LIBUR MELAUT: Warga melintasi perahu milik nelayan tradisional di Pantai Depok, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Kamis (16/6). Gelombang tinggi dan angin kencang di bulan Juni kerap jadi penyebab nelayan harus libur melaut sehingga produksi ikan menurun.